

ANALISIS PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN*)

ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AT SENIOR VOCATIONAL SCHOOL

Subijanto

Sekretariat Balitbang Kemdikbud, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat
Email:subijanto2010@gmail.com

Abstract: *The objective of this article is to analyze the development of implementation for entrepreneurship education at senior vocational school. The problem formulation of this article are as follow: 1) how is the condition of facilities and infrastructure for implementation of entrepreneurship education at senior vocational school?; 2) how is the model of collaboration between Senior Vocational School and business/industry?; 3) how is the management of Senior Vocational School particularly for the implementation of entrepreneurship education? The result of analysis shows that: 1) the implementation of entrepreneurship education has not yet supported by sufficient facilities and infrastructure for training/practice; 2) collaboration model for the implementation of entrepreneurship education between Senior Vocation School and business or industry has not formulated operationally; and 3) the vocational education has not yet managed optimally, particularly in term of collaboration and sharing of various learning facilities.*

Keywords: *entrepreneurship education, the model of collaboration, senior vocational school, and business/industry.*

Abstrak: *Tujuan penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis perkembangan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di SMK. Permasalahan yang dirumuskan: 1) bagaimana kondisi sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di SMK?; 2) bagaimana pola kerjasama yang dilakukan antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri? 3) bagaimana pengelolaan SMK khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan? Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan belum didukung oleh sarana dan prasarana pelatihan/praktik yang memadai; 2) pola kerjasama penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan antara SMK dengan dunia usaha dan industri (DUDI) belum dirumuskan secara operasional; dan 3) penyelenggara pendidikan kejuruan belum dikelola secara optimal, khususnya dalam hal kerjasama dan sharing berbagai sarana pembelajaran.*

Kata kunci: *pendidikan kewirausahaan, sekolah menengah kejuruan, model kolaborasi, dunia usaha/ industri*

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu wujud nyata untuk menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha dalam metodologi pendidikan sebagai penjabaran dari pengembangan Ekonomi Kreatif (Perpres Nomor 6 Tahun 2009). Pada hakikatnya, tujuan pemberian materi tersebut antara lain memberi bekal kemampuan dalam wujud kompetensi dasar terkait dengan kemandirian lulusan agar mampu bekerja secara mandiri.

Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikan teori kewirausahaan dengan praktik di dalam suatu pekerjaan. Di samping itu, pendidikan dimaksud lebih menekankan pada penguasaan bidang pekerjaan tertentu secara praktikal yang diselenggarakan pada satuan pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan kewirausahaan di SMK telah dilakukan melalui usaha "unit produksi" di berbagai bidang program studi/ bidang keahlian. Sekalipun demikian, keberlangsungan karya nyata dalam kewirausahaan di SMK masih sangat bervariasi pada tingkat keberhasilannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan sampai saat ini

*) Diterima tanggal 6 Februari 2012 - dikembalikan tanggal 12 Februari 2012 - disetujui tanggal 1 Juni 2012

dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kewirausahaan di SMK?; 2) bagaimana pola kerja sama yang dilakukan antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri?; 3) bagaimana pengelolaan SMK, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan?

Tujuan penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan dan perkembangan pendidikan kewirausahaan di SMK.

Kajian Literatur

Pengertian Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Secara bebas pengertian kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah jiwa, semangat, sikap, perilaku, dan potensi kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan kata lain, kewirausahaan dalam hal ini merupakan suatu kreativitas dan inovasi yang dimiliki para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menghasilkan nilai tambah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain/masyarakat serta mendatangkan kemaslahatan bersama. Potensi *entrepreneur* seseorang selain ada pada setiap individu (pembawaan) dapat pula dibentuk melalui pembelajaran secara terpadu antara teori dan praktik melalui pelatihan dan/ atau pemagangan.

Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata (bisnis) secara kreatif dan produktif. Dengan kata lain, wirausaha merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam mengambil tindakan secara tepat dan mengambil keuntungan untuk meraih sukses di bidang bisnis (Puskur: Pendidikan Kewirausahaan dalam Google, diunduh 22 Desember 2009).

Secara epistemologis, kewirausahaan pada prinsipnya merupakan suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, motivator, tujuan, siasat, dan kiat-kiat dalam menghadapi tantangan hidupnya.

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) muncul manakala seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Esensi kewirausahaan, yaitu menciptakan nilai tambah melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda agar dapat bersaing secara bebas di pasar.

Menurut Zimmerer (dalam Balitbang, 2010) nilai tambah (*added value*) tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut: 1) pengembangan teknologi baru (*developing new technology*); 2) penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*); 3) perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*); dan 4) penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih produktif dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*). Dengan demikian, seorang wirausaha dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam merumuskan manajemen strategis dan berorientasi ke depan dalam menganalisis kebutuhan pasar dan pelanggan serta berani mengambil resiko.

Tujuan Pendidikan Kejuruan dan Implikasi Pendidikan Kewirausahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 25 ayat 4 dinyatakan secara implisit bahwa lulusan (SMK) diharapkan dapat memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencerminkan kemampuan lulusan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara aktif, interaktif, kreatif, menantang, menyenangkan, dan mandiri sesuai dengan potensi diri, perkembangan fisik, bakat dan minat, serta psikologis peserta didik.

Fakta empirik menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SMK belum sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Para lulusan cenderung sebagai "pencari kerja" dan belum banyak yang mampu bekerja "mandiri" untuk mengimpelementasikan dan mengembangkan keterampilannya (*survive skills*). Di sisi lain, masih rendahnya etos kerja lulusan SMK dalam hal *entrepreneurial mindset*.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum

dan pendidikan menengah kejuruan (Pasal 18, ayat 2). Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan bentuk satuan pendidikan umum, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan menengah kejuruan. Penyelenggaraan SMA dimaksudkan untuk memberikan kompetensi akademik kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sebaliknya, SMK lebih menekankan pada penyiapan peserta didik untuk siap bekerja pada bidang tertentu. Penyelenggaraan SMK juga memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan vokasi, profesi, maupun akademik (tujuan ganda). Namun demikian, pembelajaran SMK dengan tujuan ganda tidaklah mudah untuk dilaksanakan secara seimbang akan tetapi secara konseptual antara lain dapat diberikan melalui penguatan penambahan materi IPA (matematika, fisika, dan biologi) serta bahasa Inggris untuk membentuk kompetensi berpikir kritis dan analitis dan berkomunikasi (*soft skills*).

Secara utuh, penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan berfungsi untuk: 1) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; 2) meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; 3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4) meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; 5) menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun rohani; dan 6) meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (PP No.17/2010).

Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang: 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 2) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 3) sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 4) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab (PP No.17/2010).

Dalam mempersiapkan lulusan SMK, pemberian materi di SMK lebih menekankan pada penguasaan

keterampilan tertentu agar lebih siap bekerja di bidang tertentu. Dengan kata lain, bagi lulusan SMK lebih dipersiapkan untuk menguasai keterampilan tertentu di bidang vokasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa lulusan SMK lebih dipersiapkan untuk bekerja dan/atau hidup mandiri di masyarakat. Hal ini sejalan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Pada waktu Prof. Dr. Ing Wardiman Joyonegoro sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa penerapan konsep keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) atau lebih dikenal dengan pendidikan sistem ganda (PSG) merupakan awal dari reformasi pendidikan kejuruan. Pola pendidikan kejuruan seperti ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan DUDI. Pendidikan kejuruan model ini lebih menekankan pada penguasaan kompetensi (*hard and soft skills*) untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja.

Penyempurnaan penyelenggaraan sekolah kejuruan secara terus-menerus dilakukan seiring dengan perkembangan IPTEKS, yaitu antara lain melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, di mana pencapaian kompetensi bagi para lulusannya dapat dibuktikan dengan uji sertifikasi. Pada saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan dan mengimplementasikan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dengan KTSP ini diharapkan setiap satuan pendidikan dapat menyesuaikan program pendidikannya sesuai kebutuhan dan potensi sekolah/daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, untuk membentuk kepribadian yang tangguh, telah diimplementasikan pendidikan karakter bangsa (*nation character building*) dan pendidikan kewirausahaan sebagai wujud dari konsep ekonomi kreatif.

Implikasi pendidikan kewirausahaan di SMK pada hakikatnya telah dioperasionalkan atau dijabarkan dalam kegiatan/program di SMK dan dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Semenjak diimplementasikannya program "unit produksi" pada program studi/program keahlian telah menunjukkan bahwa peserta didik dikondisikan untuk lebih menguasai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan sikap mandiri untuk bekerja.

Sebagai contoh, pengembangan fasilitas di SMK program studi/keahlian Pariwisata/Sekretaris/manajemen, sekolah dilengkapi dengan "hotel mini" dengan berbagai fasilitas yang tersedia sesuai dengan kemampuan sekolah yang bersangkutan. Fasilitas tersebut dipergunakan sebagai wahana peserta didik bekerja dalam suasana yang sebenarnya. Fasilitas tersebut juga diberikan kepada masyarakat/publik yang memerlukannya. Di samping itu, tersedia pula fasilitas pelayanan publik lainnya seperti: penjualan tiket (*ticketing*); penjualan alat-alat tulis kantor (ATK); penjualan bahan-bahan untuk keperluan siswa, termasuk foto *copy*.

Di bidang kerumahtanggaan, dikembangkan berbagai jasa layanan di bidang boga dan busana (roti/patiseri, kedai makanan dan minuman, penjualan busana dan jasa kecantikan. Di bidang teknologi, misalnya lebih banyak lagi unit produksi yang diberikan kepada masyarakat umum, antara lain seperti bidang otomotif (*service otomotifve*), perkayuan (*furniture* dan *mebeller*), permesinan untuk produksi mur dan baut dengan menggunakan mesin *CNC*, dan di bidang teknologi pertanian dengan berbagai jasa kerja sama dengan pihak DUDI.

Penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan pada akhir-akhir ini oleh pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan telah merencanakan kebijakan, yaitu dalam bentuk program sasaran strategis SMK untuk mempersiapkan para lulusannya siap bekerja melalui layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan. Upaya dimaksud, antara lain berupa: 1) penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan SNP; 2) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMK berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; 3) penyediaan bantuan pendanaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan SMK berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; 4) penguatan sistem tata kelola di SMK, Direktorat Pembinaan SMK, dan institusi Pembina SMK lainnya (Direktorat Pembinaan SMK, 2010).

Khususnya untuk mendukung program ekonomi kreatif, pada tahun 2010-2014 telah ditetapkan pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perlu merumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang

menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha dalam pembelajaran di SMK antara lain melalui: 1) mengkaji dan merevisi kurikulum SMK agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin; 2) meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik; 3) menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antarpengyelenggara pendidikan; 4) meningkatkan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif; 5) menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antarlulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif; 6) mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan 7) memfasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antarinsan kreatif Indonesia di dalam dan di luar negeri (Direktorat Pembinaan SMK, 2010). Namun demikian, hal tersebut perlu ditangani secara serius dan sebagai bentuk program prioritas dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap dan berkesinambungan. Selain itu, perlu juga segera disusun pola/mekanisme kemitraan atau kerja sama yang saling menguntungkan bagi SMK dan DUDI.

Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan

Pendidikan pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Berdasarkan UUSPN Nomor: 20/2003 sektor/bidang pendidikan diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu berdaya saing dalam kehidupan regional, nasional, dan global.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam memberikan arahan program di bidang pendidikan tahun 2009-2014 menyatakan bahwa: "Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat". Sejalan dengan arahan tersebut, pembangunan pendidikan diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang didukung oleh keselarasan antara kesejahteraan tenaga terdidik dengan kemampuan untuk: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan; dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pembangunan (Direktorat Pembinaan SMK, 2010).

Lebih lanjut, salah satu sasaran strategis SMK dalam mengupayakan menjawab kesiapan lulusan untuk siap bekerja, yaitu terkait dengan target agar pada tahun 2014 seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMK pada tahun 2010 telah dilakukan upaya, antara lain: 1) penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan SNP; 2) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMK berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; 3) penyediaan bantuan pendanaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan SMK berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota; 4) penguatan sistem tata kelola di SMK, Direktorat Pembinaan SMK, dan institusi Pembina SMK lainnya (Direktorat Pembinaan SMK, 2010).

Khususnya untuk mendukung ekonomi kreatif, pada tahun 2010-2014 telah ditetapkan pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk menumbuhkan hal tersebut, perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha dalam metodologi pendidikan.

Dalam pengembangan metodologi pendidikan SMK, telah dirumuskan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut: 1) melakukan kajian dan revisi kurikulum SMK agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin; 2) meningkatkan kualitas SMK yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik; 3) menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antarpengelola pendidikan; 4) peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas SMK yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif; 5) menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antarlulusan SMK yang terkait dengan kebutuhan pengembangan

ekonomi kreatif; 6) mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di SMK dalam pengembangan ekonomi kreatif; dan 7) fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antarinsan kreatif Indonesia di dalam dan di luar negeri (Direktorat Pembinaan SMK, 2010)

Atas dasar kebijakan tersebut, penyelenggaraan SMK menjadi keniscayaan melakukan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri (DUDI) secara terprogram yang dapat menciptakan suasana kerja sama secara *mutual simbiosis*, *mutual understanding*, dan *mutual benefit*.

Perkembangan Pendidikan Kejuruan dan Teknologi

Istilah pendidikan kejuruan dan teknologi yang sekarang berkembang, terdapat konotasi dan kecenderungan untuk memberikan definisi pendidikan kejuruan dan teknologi sebagai suatu institusi yang melakukan upaya penyiapan tenaga kerja sesuai dengan minat peserta didik. Namun demikian, dalam perkembangannya cukup banyak batasan yang berkaitan dengan pendidikan kejuruan dan teknologi, yaitu antara lain berbagai pendapat para ahli seperti berikut ini.

Pada tahun 1920-an, Barlow (dalam Balitbang, 2010) menyatakan bahwa pendidikan vokasi sebagai alat seseorang mendapatkan kesiapan dan membuat mereka siap untuk jasa yang kita perlukan (*vocational education means getting people ready and keeping them ready, for types of services we need.*) Batasan tersebut sangat luas, karena istilah "*services*" mengandung pengertian yang sangat bervariasi.

Struck (dalam Balitbang, 2010) memberikan perspektif lain terhadap pendidikan kejuruan dan teknologi, yaitu mengarah pada pemberian pengalaman kepada peserta didik agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nampaknya, batasan ini masih sangat umum, karena tidak secara eksplisit menunjukkan jenis dan jenjang pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Salah satu jenis pendidikan kejuruan dan teknologi, yaitu sekolah menengah kejuruan teknologi. Ia mempunyai tujuan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan kerja tingkat menengah sebagai juru/teknisi sesuai dengan jenis kejuruan tertentu. Dengan demikian, pengelolaan proses pembelajaran lebih diarahkan pada keterpaduan teori dan praktik keterampilan kejuruan yang mengacu

pada persyaratan kerja tingkat menengah yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Adanya *mismatch* antara apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja menjadi perhatian serius oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Keseriusan tersebut tercermin dalam program unggulan 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pada program 100 hari, khususnya program pendidikan, akan dirumuskan mekanisme, *policy*, dan *action plan* dalam menangani *mismatch* tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas terhadap lulusan SMK, Kemendikbud akan memperbanyak simulasi-simulasi industri di masing-masing SMK. Simulasi industri dimaksud agar para siswa SMK mendapatkan pengetahuan tentang budaya kerja, kondisi riil di industri, dan penguasaan teknologi.

Pengembangan pola kemitraan juga akan dilakukan sebagai rencana aksi Pemerintah. Kemitraan tersebut akan dijalin antara SMK, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri, termasuk industri kreatif. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat intermediasi dan kesempatan pemagangan serta kesesuaian pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja (Balitbang, 2010). Di sisi lain, peningkatan daya saing pendidikan dapat dilakukan dengan mengembangkan kewirausahaan, termasuk *technopreneur* (*entrepreneur* di bidang IT) melalui kerja sama antarinstansi pendidikan dengan dunia usaha. Melalui berbagai upaya sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan akan tercipta *link and match* antara pendidikan dan ketenagakerjaan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja, serta selanjutnya dapat menurunkan tingkat pengangguran ke tingkat yang terendah.

Konsep *link and match* pada hakikatnya telah dirintis semenjak tahun 1994-an, di mana telah ditetapkan 5 SMK model PSG (Jakarta, Karawang, Semarang, Surabaya, dan Medan) yang dibantu oleh *German Technical Zusammenarbeit (GTZ)*. Namun, dalam perkembangannya mengalami pasang-surut yang disebabkan, antara lain oleh kurang adanya pola kemitraan secara jelas yang dapat menimbulkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (*mutual benefit*). Gagasan untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan pada mulanya direncanakan adanya pemberian keringanan pajak bagi DUDI yang telah melakukan kolaborasi dengan SMK secara intensif dan dapat dipertanggung-

jawabkan hasilnya. Dalam proses mewujudkan gagasan tersebut diperlukan waktu dan adanya "*political will*" yang kuat dari Pemerintah.

Di samping penerapan konsep keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*), penataan program studi/program keahlian (*re-engineering*) merupakan penyesuaian bidang dan program keahlian yang ada di seluruh SMK (Negeri dan Swasta) agar sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar kerja. Hasil penataan *re-engineering* akan bermanfaat bagi: 1) SMK karena bidang/program keahlian yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; 2) calon siswa dan orang tua siswa, karena dapat memilih bidang/program keahlian yang memungkinkan terserapnya di dunia kerja; 3) dunia usaha dan industri, karena memudahkan mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya; dan 4) instansi pembina, karena memperoleh informasi kebutuhan wilayah/daerah sebagai bahan dalam penetapan kebijakan perencanaan dan strategi pembinaan (Balitbang, 2010).

Penataan pendekatan sistem pembelajaran pada SMK secara bertahap akan mengarah pada penerapan CBT (*Curriculum Based Training*) yang memenuhi prinsip-prinsip kurikulum berbasis kompetensi yang sekarang dikembangkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi pada dasarnya memberi layanan pembelajaran secara individu. Oleh karena itu, penyelenggaraan SMK akan berhasil efektif dan efisien manakala: 1) menyediakan bahan ajar/modul yang memadai, dari segi baik jumlah, jenis, dan kualitasnya; 2) menyediakan waktu belajar yang cukup sesuai dengan kecepatan dan kemampuan belajar masing-masing peserta didik; 3) menyediakan fasilitas pembelajaran yang memungkinkan melakukan pembelajaran klasikal di sekolah dan praktik industri di luar sekolah; 4) melaksanakan penilaian apabila peserta didik telah siap; 5) memberikan pengakuan terhadap hasil-hasil belajar yang dimiliki sebelumnya di peroleh di luar program belajar di sekolah (Balitbang, 2010).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 sebagai upaya jangka panjang untuk lebih meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan. Dengan kurikulum ini, diharapkan jajaran pendidikan menengah kejuruan lebih mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga siap

bekerja/mandiri, membentuk pribadi yang mandiri, mampu menempatkan diri sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, substansi kurikulum dirumuskan dalam upaya memenuhi tuntutan perubahan orientasi pendidikan, perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang dipersyaratkan. Idealnya, kurikulum yang diberlakukan di SMK dari Kurikulum 2004 menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), ditinjau dari proses pembelajaran menganut prinsip pembelajaran tuntas (*mastery learning*), sehingga mampu menguasai sikap (*attitude*), ilmu pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skills*) secara tuntas agar dapat bekerja mandiri sesuai dengan tuntutan kompetensi.

Dengan mempertimbangkan bahwa lulusan SMK diharapkan dapat bekerja sebagai wiraswasta/wirausaha, sehingga pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tersebut di atas dapat dilakukan melalui dua jalur alternatif, yaitu: 1) *Jalur* kelas industri/*employee* di mana peserta didik belajar di sekolah dan praktik/berlatih di industri; dan 2) *Jalur* kelas wiraswasta/mandiri/*selfemployed* di mana peserta didik belajar dan praktik/berlatih berwirausaha di sekolah dan/atau di DUDI dan berusaha secara mandiri.

Data Balitbang Depdiknas tahun 2005 menunjukkan bahwa populasi tamatan SMP sebesar 3,2 juta/tahun, sedangkan daya tampung SLTA baru mencapai 1,9 juta/tahun (Balitbang, 2005). Data tersebut antara lain perlu dijawab dengan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya melalui SMK. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa daya tampung SMA setiap tahun tidak dapat menampung seluruh tamatan SMP. Di samping itu, belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang kompeten pada berbagai sektor. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan mendasar untuk segera dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SMK.

Pengembangan SMK diharapkan mampu mensinergikan seluruh sumber daya yang tersedia di masyarakat, sehingga terjadi efisiensi dalam pendayagunaan sumber-sumber belajar. Program tersebut dirancang untuk menampung tamatan SMP/MTs agar dengan mudah mendapat layanan pendidikan tingkat SMK di daerahnya masing-masing. Pendidikan kejuruan dirasa masih diperlukan, karena memiliki paradigma yang menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan

pasar (*demand driven*) untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Ketersambungan (*link*) di antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (*match*) antara *employee* dengan *employer* menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Keberhasilan penyelenggaraan SMK dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya. Dalam skala makro, pendidikan kejuruan melayani sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik dan menjadi jawaban/terobosan pembangunan ekonomi kreatif.

SMK saat ini seperti mata uang yang memiliki dua sisi yang sama pentingnya. Artinya, selain tujuan SMK untuk membentuk lulusan yang siap memasuki dunia kerja, di sisi lain juga dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penambahan beberapa jam mata pelajaran adaptif seperti Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, dan lain-lain.

Sekalipun demikian, secara empirik bahwa tujuan ganda SMK tidak mungkin dapat diberikan pola pembelajaran secara seimbang antara tujuan untuk kesiapan bekerja dengan kesiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ditinjau dari aspek kurikulum pembelajaran SMK, pada hakikatnya tujuan SMK lebih menekankan pada pemberian pembelajaran untuk menyiapkan tamatan untuk memasuki dunia kerja (siap kerja/latih).

Pemberdayaan Masyarakat dan DUDI

Dari tahun ke tahun kontribusi DUDI dalam pengembangan pendidikan kejuruan masih rendah (Direktorat Pembinaan SMK, 2010). Hal ini lebih disebabkan belum adanya pola kemitraan antara dunia pendidikan dengan DUDI dan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan tidak dapat berdiri sendiri dan lepas dari keterkaitan dengan DUDI. Meskipun demikian, telah mulai dirasakan hasil kemitraan SMK dengan DUDI sepuluh tahun terakhir ini, antara lain seperti perakitan komputer (laptop) merek "Zyrex" di beberapa lokasi SMK. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cibinong dengan beragam komponen mikroskop hingga otomotif, dan akhir-akhir ini adanya produk mobil "esemka" di Solo Surakarta, serta perakitan pesawat terbang oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 29 Jakarta. Hal

ini menunjukkan adanya hasil nyata bahwa spirit SMK melalui jargon atau motto "Bersama SMK Bisa" mulai menjadi kenyataan.

Untuk menciptakan hubungan yang dapat menimbulkan *mutual symbiosis*, *mutual understanding*, dan *mutual benefit* dan/atau sinergitas jejaring kerja, Direktorat Pembinaan SMK telah merumuskan kebijakan strategis, yaitu: 1) pembentukan sistem yang mengatur kemitraan strategis dengan DUDI untuk meningkatkan relevansi lulusan SMK dengan kebutuhan DUDI; 2) optimalisasi pemanfaatan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan *multy national cooperation* untuk peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan; 3) pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan (misalnya dengan organisasi profesi dalam merumuskan sertifikasi profesi); 4) membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas; 5) mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan SDM; dan 6) pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat dan di DUDI untuk peningkatan kualitas pendidikan pada SMK (Direktorat Pembinaan SMK, 2010). Sekalipun demikian, tanpa adanya rambu-rambu atau pedoman pola kerja sama yang disepakati bersama antara SMK dengan DUDI akan menjadi salah satu kendala dalam membangun jejaring kerja, khususnya untuk melaksanakan pendidikan kewirausahaan.

Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu berdaya saing pada tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional (global) serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, sistem pendidikan SMK secara minimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan PP Nomor 19/2005. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Melalui SNP diharapkan penyelenggaraan pendidikan SMK dapat terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perubahan kehidupan regional, nasional, dan global, sehingga mutu pendidikan SMK dapat terjamin. Setiap SMK dapat mengembangkan pendidikan dan pembelajarannya secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan program keahlian. Dengan kata lain, setiap SMK diberi keleluasaan untuk mengoptimalkan

pembelajaran peserta didiknya sesuai dengan bakat dan minat, karakteristik sekolah, potensi daerah, dan kekhasan program keahlian yang tidak harus sama dengan SMK di daerah lain.

Namun demikian, penyelenggaraan SMK sudah menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan dengan pendekatan filosofi *link and match* (keterkaitan dan kesepadanan) antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diajarkan di masyarakat dan di DUDI sekalipun hal ini memerlukan waktu dan pranata yang terus dikembangkan dan diperbaiki secara bertahap dan berkesinambungan, terutama dalam hal pola/ mekanisme kemitraannya.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Mendikbud M. Nuh, dengan istilah "pisau segitiga" di mana dalam operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan (termasuk SMK) dirasa perlu melakukan *sharing* (berbagi) sarana prasarana pembelajaran (termasuk TIK), tenaga pendidik, dan kolaborasi pengelolaan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat profesi dengan DUDI (Rembuknas, 2012). Agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan DUDI maka partisipasi dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terhadap penyelenggaraan SMK sudah menjadi keniscayaan dan tidak dapat diabaikan.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Untuk menghasilkan calon lulusan SMK memiliki pola pikir dan kesiapan untuk siap bekerja mandiri sebagai wirausaha diperlukan seperangkat peralatan yang mendukung proses pembelajaran. Peralatan dimaksud sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya kompetensi calon lulusan SMK yang siap bekerja. Salah satu permasalahan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan yang dihadapi oleh SMK, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk membentuk *mindset* dan kesiapan peserta didik untuk bekerja mandiri. Keterbatasan sarana dan prasarana dimaksud sangat bervariasi antara program studi/keahlian yang satu dengan yang lainnya, antara SMK yang satu dengan yang lainnya.

Sarana pendukung masih terbatas sebagai simulasi pembelajaran praktik sesuai dengan suasana bekerja di DUDI. Jikalau sarana praktik memadai adakalanya jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik. Dalam kondisi tersebut tidak ada cara lain kecuali dilakukan pemberdayaan sarana pembelajaran secara berpasangan maupun

secara berkelompok. Oleh karena keterbatasan sarana pembelajaran, maka pembentukan sikap dan kompetensi sebagai calon lulusan yang siap latih/kerja secara mandiri atau sebagai wirausaha baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok masih belum optimal. Untuk mengoptimalkan pembelajaran pendidikan kewirausahaan perlu melakukan kerja sama (*networking*) dengan masyarakat atau pihak DUDI.

Permasalahan penyerta lainnya dalam menghasilkan lulusan yang siap berwirausaha yaitu masalah “pemasaran” hasil produksi. Permasalahan tersebut pada umumnya SMK penyelenggara masih kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang memang berorientasi pada kualitas produksi dan jaringan pemasarannya ke masyarakat. Permasalahan penyelenggaraan kewirausahaan dalam bentuk “unit produksi” juga dianggap oleh Itjen Kemdikbud dan BPK tidak diperkenankan manakala hasilnya tidak disetor ke negara. Hal ini dianggap sebagai penghasilan negara bukan pajak (PNBP). Sebenarnya masih ada celah penyelenggaraan kewirausahaan dalam bentuk unit produksi dalam menyikapi permasalahan sebagai PNBP yaitu pemasarannya lewat Koperasi atau badan usaha lainnya yang dibolehkan oleh undang-undang.

Permasalahan lainnya berasal dari internal SMK itu sendiri, yaitu masih bervariasinya tingkat kompetensi para pendidik secara substantif. Hal ini pada umumnya karena *up dating* kompetensi pendidik sering tertinggal dengan perkembangan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDI. Di samping itu, jika melibatkan peserta didik dalam kegiatan unit produksi, tingkat kompetensi peserta didik masih dalam taraf sangat mendasar dan bersifat pengembangan. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik dalam kegiatan unit produksi masih bersifat latihan dan sebatas sebagai *trainee* atau siswa magang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan standar produk pada setiap jenis dan kualitas barang/hasil produksi.

Permasalahan keterbatasan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan, telah diantisipasi oleh Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah namun nampaknya belum dapat terpenuhi. Oleh karena itu, salah satu solusi yang efektif dan efisien yaitu melakukan kerja sama dengan DUDI. Dengan cara tersebut diharapkan memenuhi ketercapaian kompetensi calon lulusan SMK dapat segera terpenuhi.

Pola kerja sama penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan antara SMK dengan DUDI perlu dirumuskan secara operasional, baik secara terpusat maupun daerah sesuai dengan kondisi dan potensi DUDI di masing-masing daerah. Diharapkan pola kerja sama dapat tercipta prinsip-prinsip yang saling menumbuhkan, saling memerlukan, saling pengertian, dan saling menguntungkan kedua pihak. Ke depan, kiranya dapat diupayakan adanya peraturan daerah dalam hal pemberian keringanan pajak (*levy*) bagi DUDI yang telah melakukan kerja sama dengan SMK dalam melaksanakan dan pengembangan pendidikan kewirausahaan.

Dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan antara SMK dengan DUDI belum ada panduan pola kerja sama atau mekanisme kerja sama secara nasional maupun lokal. Hal ini sangat diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur keluaran kompetensi peserta didik pada akhir pelatihannya di DUDI. Pola kerja sama ini sangat diperlukan agar lebih terarah terhadap tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengoperasionalkan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan.

Menyadari sepenuhnya bahwa sekolah menengah kejuruan memiliki jumlah program studi/keahlian yang sangat banyak dan memiliki karakter yang cukup kompleks dari masing-masing rumpun keahlian. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kejuruan perlu dikelola secara optimal, khususnya dalam hal kerja sama dan *sharing* berbagai sarana pembelajaran.

Meskipun Mendikbud telah menetapkan kebijakan dalam berbagai fasilitas dan SDM (pendidik) nampaknya pengelolaan SMK masih belum dapat diwujudkan pada saat sekarang ini. Bisa jadi hal tersebut sangat bergantung kepada siapa yang sedang diberi kepercayaan (amanah) untuk membinanya. Jangan sampai gara-gara terjadi pergantian pimpinan/direktur program yang telah terencana secara sistemik dan mapan mudah berubah hanya karena pergantian pimpinan.

Pengelolaan SMK belum dikelola secara optimal, khususnya dalam hal kerja sama dengan DUDI tercermin pada belum adanya saling pengertian antara kedua pihak yang diindikasikan bahwa belum ada pemahaman yang sama antara pihak SMK dengan DUDI, terutama dalam memberi bekal

kompetensi kewirausahaan sehingga calon lulusan SMK memiliki sikap dan kesiapan bekerja secara mandiri sebagai wirausaha.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pendidikan kewirausahaan telah diimplementasikan di SMK semenjak dikembangkannya program pengembangan sekolah seutuhnya (*school development*) yaitu dalam bentuk program "unit produksi". Pengembangan unit produksi di berbagai program studi/program keahlian telah menghasilkan produk yang cukup berkualitas, namun masih ada celah kelemahannya yaitu pada penyelesaian akhir suatu produk (*finishing*) dan pemasaran hasil serta ketepatan waktu pengerjaan. Keberadaan unit produksi selain melatih simulasi peserta didik untuk bekerja yang sesungguhnya di DUDI, namun juga dapat dipergunakan sebagai wahana peningkatan kompetensi peserta didik yang sedang melakukan program PSG (*link and match*). Di samping itu, secara makro unit produksi sebagai wahana pengenalan peserta didik berwiraswasta di kemudian hari.

Pendidikan kewirausahaan sebagai bagian dari wujud penjabaran Instruksi Presiden Nomor 6/2009 tentang ekonomi kreatif, telah diterapkan di SMK. Diharapkan setelah menyelesaikan pendidikannya di SMK setiap lulusan memiliki sikap dan kompetensi untuk bekerja secara mandiri sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya dari SMK. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMK telah dan sedang melaksanakan program strategisnya untuk mewujudkan hal tersebut. Namun demikian, dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan masih ditemui beberapa kendala sebagai berikut, yaitu: 1) penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan belum didukung oleh sarana dan prasarana pelatihan/praktik yang memadai; 2) pola

kerja sama penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan antara SMK dengan DUDI belum dirumuskan secara operasional; dan 3) penyelenggara pendidikan kejuruan belum dikelola secara optimal, khususnya dalam hal kerjasama dan *sharing* berbagai sarana pembelajaran.

Saran

Berdasarkan simpulan, berikut beberapa saran yang diajukan kepada Direktorat Pembinaan SMK: 1) secara bertahap dan terus menerus memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan secara bertahap dan berkesinambungan; 2) menyusun pola/mekanisme kerja sama penyelenggaraan kemitraan dengan DUDI terkait dengan pendidikan kewirausahaan; 3) merumuskan dan melaksanakan pengelolaan SMK secara optimal antara lain melalui jejaring kerja dengan berbagai sumber belajar yang ada di masyarakat maupun di DUDI.

Di samping itu, bagi SMK perlu melakukan *lesson learn* dengan SMK yang telah berhasil menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan, seperti misalnya ke SMK Michael Surakarta (bidang permesinan) dan SMK PIKA Semarang (*kayu/furniture*) khususnya dalam hal "pemasaran" dan manajemen pengelolaan kewirausahaan yang sederhana/praktis, efisiensi, dan berhasil guna. Selanjutnya, meningkatkan program magang guru bagi guru produktif untuk melakukan pemagangan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan/atau *updating* kompetensi sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan kemajuan teknologi. Untuk itu, perlu pula dirumuskan mekanisme "pemagangan industri" dan standar operasional prosedur (SOP) bagi pendidik yang akan melakukan program "pemagangan". Pemberian dana bergulir secara selektif melalui dana APBN/D di beberapa SMK yang memenuhi syarat sebagai sekolah rintisan model SMK berbasis kewirausahaan di masing-masing daerah sesuai potensi masing-masing.

Pustaka Acuan

- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2010. *Laporan Hasil Studi Proporsi SMA: SMK*, Balitbang, Jakarta
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2005. *Education in Brief*, Balitbang, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Depdiknas, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Kemdiknas, Jakarta

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2010. *Kebijakan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan*, Kemdiknas, Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan*, Kemdikbud, Jakarta.

Pusat Kurikulum: Pendidikan Kewirausahaan dalam web.Google, diunduh 22 Desember 2009

Peraturan Presiden Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945